

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era reformasi birokrasi dan meningkatnya tuntutan transparansi publik, pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) (Mardiasmo, 2018). Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara (Halim, 2016). Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tersebut tercermin melalui kinerja keuangan daerah, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara optimal (Mahmudi, 2016). Oleh karena itu, kinerja keuangan daerah menjadi indikator strategis untuk menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kinerja keuangan daerah memiliki peranan penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik, membiayai pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mahmudi, 2016). Daerah dengan kinerja keuangan yang baik umumnya mampu merealisasikan program pembangunan secara tepat sasaran, menjaga efisiensi belanja, serta mempertahankan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Sebaliknya, rendahnya kinerja keuangan daerah dapat menimbulkan pemborosan anggaran, keterlambatan pembangunan, rendahnya kualitas layanan publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018).

Secara nasional, masih banyak pemerintah daerah di Indonesia yang menghadapi persoalan dalam pengelolaan keuangan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menunjukkan masih ditemukannya kelemahan kinerja keuangan daerah, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta inefisiensi belanja daerah di berbagai pemerintah daerah (BPK RI, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan daerah di Indonesia belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan perbaikan berkelanjutan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, efektivitas pengawasan, kompetensi auditor, serta kekuatan sistem pengendalian intern (Halim, 2016). Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, anggaran daerah berisiko tidak dikelola secara maksimal sehingga tujuan pembangunan sulit tercapai.

Fenomena tersebut juga relevan untuk dikaji pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan daerah. Kabupaten Aceh Timur memiliki banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola program pembangunan, pelayanan masyarakat, serta penggunaan anggaran dalam jumlah besar. Dengan kompleksitas tersebut, pemerintah daerah dituntut memiliki kinerja keuangan yang baik agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif.

Pemilihan Kabupaten Aceh Timur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Aceh Timur merupakan kabupaten dengan

struktur organisasi perangkat daerah yang cukup luas sehingga pengelolaan keuangannya melibatkan banyak SKPD. Kedua, daerah ini memiliki aktivitas pembangunan dan pelayanan publik yang membutuhkan tata kelola keuangan yang efektif. Ketiga, masih ditemukannya beberapa temuan pemeriksaan keuangan menjadikan Aceh Timur relevan sebagai objek penelitian. Keempat, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah di Kabupaten Aceh Timur masih relatif terbatas sehingga memiliki nilai akademik untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023, masih ditemukan berbagai permasalahan yang mencerminkan kelemahan kinerja keuangan daerah serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pokok temuan tersebut antara lain meliputi pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai ketentuan, ketidaksesuaian pembayaran belanja perjalanan dinas pada 15 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), kelebihan pembayaran atas 11 paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang belum dikenakan denda keterlambatan, serta perencanaan anggaran yang belum didasarkan pada perhitungan pendapatan daerah yang terukur dan belum menganggarkan pengeluaran pembiayaan secara memadai (BPK RI, 2023).

Selain itu, BPK juga mencatat permasalahan terkait pengelolaan aset daerah, seperti pencatatan aset yang belum tertib, data kepemilikan yang belum lengkap, dan aset yang belum didukung administrasi memadai (BPK RI, 2023).

Permasalahan aset merupakan indikator penting karena aset daerah merupakan bagian dari kekayaan daerah yang harus dikelola secara akuntabel. Jika pengelolaan aset belum optimal, maka kualitas laporan keuangan dan kinerja keuangan daerah juga dapat terdampak. Meskipun Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini tersebut tidak selalu menggambarkan bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan telah sempurna. Opini WTP lebih menekankan kewajaran penyajian laporan keuangan, sedangkan dari sisi manajerial masih dapat ditemukan kelemahan pengendalian intern, ketidakefisienan, dan ketidakpatuhan administratif (BPK RI, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan audit internal, kompetensi auditor, dan sistem pengendalian intern perlu terus dilakukan agar kinerja keuangan daerah di Kabupaten Aceh Timur semakin baik. Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja keuangan daerah memerlukan penguatan faktor-faktor internal organisasi. Dalam penelitian ini, faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah adalah audit internal, kompetensi auditor, dan sistem pengendalian intern. Ketiga variabel tersebut dipandang penting karena berkaitan langsung dengan proses pengawasan, kualitas sumber daya manusia, serta mekanisme pengendalian pengelolaan keuangan daerah.

Audit internal merupakan fungsi pengawasan independen dan objektif yang bertujuan memberikan keyakinan serta konsultasi guna meningkatkan efektivitas organisasi (Sawyer, 2012). Dalam sektor pemerintahan daerah, audit internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) (PP No. 60 Tahun 2008). Keberadaan audit internal penting untuk menilai kepatuhan, efisiensi, efektivitas program, serta mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Apabila audit internal berjalan efektif, maka kelemahan administrasi keuangan, pemborosan anggaran, maupun ketidaksesuaian prosedur dapat segera ditemukan dan diperbaiki. Sebaliknya, audit internal yang lemah menyebabkan masalah keuangan baru terungkap setelah pemeriksaan eksternal dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa audit internal berpotensi memengaruhi tinggi rendahnya kinerja keuangan daerah (Sawyer, 2012).

Selain audit internal, kompetensi auditor juga menjadi faktor penting. Kompetensi auditor mencerminkan kemampuan auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan berdasarkan pengetahuan, keterampilan teknis, pengalaman, serta pemahaman terhadap regulasi sektor publik (Mulyadi, 2016). Auditor yang kompeten akan mampu mengidentifikasi risiko, menilai bukti audit secara tepat, dan menghasilkan rekomendasi yang berkualitas. Dalam konteks pemerintah daerah, auditor internal yang kurang kompeten dapat menyebabkan proses pengawasan tidak berjalan maksimal. Temuan yang seharusnya dapat dideteksi lebih awal menjadi terlewat, sementara rekomendasi perbaikan tidak efektif. Oleh sebab itu, kompetensi auditor memiliki hubungan erat dengan peningkatan kinerja keuangan daerah.

Faktor berikutnya adalah sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP merupakan proses integral yang dilakukan pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset, efektivitas kegiatan, dan kepatuhan terhadap peraturan (PP No. 60 Tahun 2008). Sistem pengendalian intern yang baik akan membantu pemerintah daerah mencegah kesalahan, mengurangi risiko fraud, meningkatkan ketertiban administrasi, serta menjaga kualitas informasi keuangan. Sebaliknya, kelemahan SPIP akan membuka peluang terjadinya penyimpangan dan inefisiensi anggaran (COSO, 2013). Dengan demikian, SPIP sangat relevan dikaji dalam hubungannya dengan kinerja keuangan daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa audit internal, kompetensi auditor, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik. Penelitian Ginting (2024) menemukan bahwa audit internal dan SPIP berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain menunjukkan bahwa kompetensi auditor meningkatkan kualitas pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Tamuntuan et al., 2023). Namun demikian, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian menemukan bahwa audit internal tidak selalu berpengaruh signifikan apabila tidak didukung kompetensi auditor yang memadai (Handayani, 2017). Penelitian lain menunjukkan bahwa sistem kinerja keuangan daerah belum tentu berjalan efektif dalam praktik.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel masih perlu diuji kembali. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada daerah lain, sedangkan penelitian yang menguji pengaruh audit internal, kompetensi auditor, dan sistem pengendalian intern secara simultan terhadap kinerja keuangan daerah pada konteks Pemerintah Kabupaten Aceh Timur masih

sangat terbatas. Oleh karena itu, terdapat research gap berupa perbedaan hasil empiris, keterbatasan objek penelitian, dan masih minimnya kajian komprehensif pada Kabupaten Aceh Timur.

Novelty penelitian ini terletak pada pengujian tiga faktor utama, yaitu audit internal, kompetensi auditor, dan sistem pengendalian intern secara simultan terhadap kinerja keuangan daerah dengan focus pada studi persepsi aparatur SKPD di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini juga menggunakan perspektif responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih aktual mengenai kondisi riil di lapangan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di tengah tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, khususnya Inspektorat Daerah dan seluruh SKPD, dalam memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kompetensi aparatur, serta menyempurnakan sistem pengendalian intern.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai determinan kinerja keuangan daerah pada sektor publik. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan kebijakan dalam meningkatkan efektivitas audit internal dan tata kelola keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Audit Internal, Kompetensi Auditor, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Persepsi pada SKPD di Aceh Timur)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah audit internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Timur?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Timur?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh audit internal terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Timur.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Timur.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan audit internal, kompetensi auditor, sistem pengendalian intern, dan kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah serta menjadi bahan kajian dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui penguatan audit internal, peningkatan kompetensi auditor, serta penerapan sistem pengendalian intern yang lebih efektif.

b. Bagi SKPD Kabupaten Aceh Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada setiap SKPD mengenai pentingnya pelaksanaan audit internal, kompetensi auditor, dan sistem pengendalian intern dalam mendukung

pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

c. Bagi Inspektorat Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal, kompetensi auditor, serta efektivitas pelaksanaan audit sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah.